

SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI DALAM MANAJEMEN MADRASAH IBTIDAIYAH

Juhaeni¹, Ain Kurniati², Safaruddin³
UIN Sunan Ampel Surabaya¹, MIS Al Multazam Pontianak², IAI Muhammadiyah
Sinjai³
Email: juhaeni@uinsby.ac.id¹, ainblueyes@gmail.com², sarthi339@gmail.com³

Abstract

Centralization is the process of administering the state and government that takes place centrally. Decentralization is the surrender of government authority by the government to autonomous regions to regulate and manage self-government in the system of the Republic of Indonesia Unitary State. Decentralization of education will provide full opportunity for education managers to regulate and develop their regions, so that the potential and opportunities of education, especially Elementary School, can develop optimally.

Keywords: Centralization, Decentralization, Management of Elementary School.

Abstrak

Sentralisasi adalah proses penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang berlangsung secara terpusat. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi pendidikan ini akan memberikan peluang sepenuhnya kepada pengelola pendidikan dalam mengatur dan mengembangkan daerahnya, sehingga memungkinkan potensi dan peluang yang dimiliki oleh madrasah khususnya Madrasah Ibtidaiyah dapat berkembang secara maksimal

Kata kunci : Sentralisasi, Desentralisasi, Manajemen MI.

PEDAHULUAN

Sentralistik pendidikan dipandang mematkan asas demokrasi. Sehingga muncullah konsep desentralisasi untuk mengatasi kelemahan pada sistem sentralistik. Pemberlakuan UU Nomor 32 tahun 2004 mengisyaratkan bahwa suatu wilayah berhak mengembangkan pendidikan secara demokratis serta kondusif. Diberlakukannya UU tersebut berimplikasi terhadap sistem pengelolaan pendidikan pengelolaan pendidikan dari sistem sentralistik menjadi desentralistik.¹ Pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004,

¹ Sam M. Chan dan Tuti T. Sam, *Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 1

merupakan tantangan sekaligus peluang bagi para manajer pendidikan di daerah otonom untuk secara kreatif mengembangkan madrasah.

PEMBAHASAN

Sentralisasi adalah proses penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang berlangsung secara terpusat.² Konsep sentralistik mengabaikan peran lokal dan melemahkan semangat kreativitas daerah. desentralisasi justru dipacu untuk berkompetisi secara sehat dan mandiri.³ Kewenangan pemerintah pusat dalam bidang pendidikan tertuang dalam PP No 25 Tahun 2000.⁴ Meskipun pada akhirnya daerah dan sekolah berkewajiban menanggung biaya pendidikan di daerah dan sekolah masing-masing.⁵

Kelemahan pengelolaan pendidikan secara sentralistik: a). Keadaan geografis dan demografis Indonesia 2). Adanya perbedaan perkembangan pendidikan, SDM, sarpras dan ekonomi 3). Pengelolaan sumber dana, SDM dan sarpras pada masing-masing tingkatan.⁶

Desentralisasi terdiri dari dua kata, *de* berarti lepas dan *centrum* berarti pusat.⁷ desentralisasi berarti pelimpahan kekuasaan/wewenang yang lebih luas kepada daerah.⁸ penyediaan ruang bagi setiap satuan pendidikan untuk mengembangkan ide dan gagasannya dalam meningkatkan mutu pembelajarannya.⁹ Desentralisasi manajemen pendidikan adalah pelimpahan wewenang pengelolaan dari pusat ke daerah dengan mengacu kepada sisdiknas.¹⁰ Tugas negara adalah membantu adanya standar nasional dari lembaga pendidikan, membantu daerah yang kekurangan SDM maupun sumber

² Onisimus Amtu, *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Konsep, Strategi dan Implementasi* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 77

³ Abdurrahmansyah, *Wacana Pendidikan Islam. Khazanah Filosofis dan Implementasi Kurikulum, Metodologi dan Tantangan Pendidikan Moralitas* (Yogyakarta: Global Pustaka, 2005), hlm. 148

⁴ Sam M. Chan dan Tuti T. Sam, *Analisis SWOT...*, hlm. 7

⁵ UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

⁶ Udik Budi Wibowo. *Pergeseran Penegelolaan Pendidikan. Dari Sentralistik ke Desentralistik. Dalam Jurnal Dinamika Pendidikan, FIP-UNY No. 2 tahun VII, 2000*, hlm. 15

⁷ Nur Yahya, *Analisis Kebijakan Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Idea Press, 2012), hlm, 320

⁸ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 12

⁹ Onisimus Amtu, *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah...*, hlm. 111

¹⁰ Yoyon Bahtiar Irinato, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teori, Model* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 92

pembiayaan.¹¹ Dukungan masyarakat dalam rangka pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis madrasah menunjukkan antusiasme yang cukup menggembirakan.¹²

Tantangan daerah dalam menerapkan desentralisasi pendidikan yakni: Peningkatan mutu, Pemerataan, efisisensi manajemen peran serta masyarakat serta akuntabilitas.¹³

Kelemahan desentralisasi pendidikan melalui UU Otoda adalah: a). SDM ditingkat daerah kurang siap b). PAD tidak merata c). Membudayanya mental korup di Indonesia. d). Dijadikan komunitas untuk mendapatkan proyek bantuan dari pemerintahan pusat. e). Depdiknas kerepotan dalam hal mengalokasikan dana disebabkan belum jelasnya pos-pos pendidikan.¹⁴

Kewenangan pemerintah provinsi dalam bidang pendidikan adalah sebagai berikut: a). Kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan/atau tidak mampu. b). Bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk TK, pendidikan dasar, menengah dan pendidikan luar sekolah. c). terselenggaranya pendidikan selain pengaturan kurikulum, akreditasi, dan pengangkatan tenaga akademis. d). Pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi. e). Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan/pentaran guru. f). Penyelenggaraan museum provinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional, serta pengembangan bahasa dan budaya daerah.¹⁵

Penyelenggaraan desentralisasi pengelolaan pendidikan pemerintah kabupaten/kota berperan, yaitu mengembangkan format pengelolaan pendidikan secara terpadu dan menyeluruh, membangun jaringan para kepala sekolah dan guru, bekerjasama dengan berbagai unsur yang ada di masyarakat dan yang ada di jajaran pemerintahan kabupaten/kota serta mengambil kebijakan dan mengakomodasi kebutuhan daerah sesuai dengan karakteristik daerah, menerjemahkan kebijakan pusat sesuai dengan potensi daerah dengan mempertimbangkan segala aspek budaya, ekonomi, sosilogis, psikologis dan geografis daerah yang bersangkutan.¹⁶

¹¹ H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural* (Magelang: Indonesiatara, 2003), hlm. 268

¹² Bedjo Sujanto, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah: Model Pengelolaan Sekolah di Era Otonomi Daerah* (Jakarta: Sagung Seto, 2007), hlm. 6

¹³ Yoyon Bahtiar Irinato, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan...*, hlm. 94

¹⁴ Nur Yahya, *Analisis Kebijakan Pendidikan Islam*, hlm. 293

¹⁵ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan...*, hlm. 14

¹⁶ Hadiyanto, *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia*, hlm. 54

Cakupan desentralisasi manajemen madrasah : a). Perencanaan dan evaluasi program Madrasah. b). Pengelolaan kurikulum madrasah. c). Pengelolaan proses pembelajaran. d). Pengelolaan SDM. e). Pengelolaan sarana dan prasarana. f). serta Pengelolaan biaya pendidikan.¹⁷

Pola manajemen pendidikan dari sistem sentralisasi ke desentralisasi adalah diterapkannya manajemen peningkatan MBM yang akan membawa perubahan. Pemberlakuan MBM merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki mutu pendidikan melalui pengalihan otoritas pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke daerah dan masing-masing madrasah. Dengan demikian kepala madrasah, guru, peserta didik, dan orang tua memiliki keterlibatan yang lebih besar terhadap proses pendidikan, serta mempunyai tanggung jawab untuk mengambil keputusan terkait dengan pembiayaan, personal, dan kurikulum madrasah.¹⁸

PENUTUP

Sentralisasi adalah proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berlangsung secara terpusat, di mana semua urusan, tanggung jawab dan kewenangan negara dilaksanakan hanya oleh badan-badan pemerintahan di tingkat pusat. Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri .

Desentralisasi pendidikan memberikan peluang kepada masyarakat dalam suatu wilayah untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri, sehingga potensi dan peluang yang dimiliki oleh madrasah khususnya Madrasah Ibtidaiyah dapat berkembang secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmansyah, *Wacana Pendidikan Islam: Khazanah Filosofis dan Implementasi Kurikulum, Metodologi dan Tantangan Pendidikan Moralitas*, Yogyakarta: Global Pustaka, 2005.
- Amtu, Onisimus, *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Konsep, Strategi dan Implementasi*, Bandung: Alfabeta, 2013.

¹⁷ Bedjo Sujanto, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah...*, hlm. 38

¹⁸ Prim Masrokan Muthohar. *Manajemen Mutu Sekolah, Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2013), hlm, 124

- Bahtiar Irinato, Yoyon, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teori, Model*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011.
- Budi Wibowo, Udik, *Pergeseran Penegelolaan Pendidikan. Dari Sentralistik ke Desentralistik, Dalam Jurnal Dinamika Pendidikan, FIP-UNY No. 2 tahun VII*. 2000
- Hadiyanto, *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- M. Chan, Sam dan Tuti T. Sam, *Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Masrokan Muthohar, Prim, *Manajemen Mutu Sekolah, Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2013.
- Sujanto, Bedjo, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah: Model Pengelolaan Sekolah di Era Otonomi Daerah*, Jakarta: Sagung Seto, 2007.
- Tilaar, H.A.R, *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- _____, *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*, Magelang: Indonesiatera, 2003.
- Yahya, Nur, *Analisis Kebijakan Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Idea Press, 2012.